



PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPIN



# RENCANA STRATEGIS

**PERUBAHAN  
2024 - 2026**

**Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan**

**2024**

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR GAMBAR

<b>BAB I</b> .....	Bab I-iii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	Bab I-1
1.1 Latar Belakang.....	Bab I-1
1.2 Landasan Hukum .....	Bab I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	Bab I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	Bab I-7
<b>BAB II</b> .....	Bab II-1
<b>GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG</b> .....	Bab II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbang .....	Bab II-1
1. Kepala .....	Bab II-2
2. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.....	Bab II-3
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan.....	Bab II-9
7. Kelompok Jabatan Fungsional.....	Bab II-10
2.2 Sumber Daya Bappelitbang.....	Bab II-12
a. Sumber Daya Manusia.....	Bab II-13
b. Aset.....	Bab II-14
2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbang.....	Bab II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang .....	Bab II-20
<b>BAB III</b> .....	Bab III-1
<b>PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS</b> .....	Bab III -1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	Bab III -1
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	Bab III -2
<b>BAB IV</b> .....	Bab IV-1
<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	Bab IV -1
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	Bab IV -1
4.2 Cascading Kinerja Bappelitbang.....	Bab IV -1
<b>BAB V</b> .....	Bab V -1
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	Bab V -1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	Bab V -1
<b>BAB VI</b> .....	Bab VI-1
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	Bab VI -1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	Bab VI -1
<b>BAB VII</b> .....	Bab VII-2
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	Bab VII -2
7.1 Indikator Kinerja Bappelitbang .....	Bab VII 2
<b>BAB VIII</b> .....	Bab VIII-1
<b>PENUTUP</b> .....	1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1_Sarana-Prasarana.....	15
Tabel 2.2_Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang .....	17
Tabel 2.3_Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang .....	18
Tabel 2.4_Perkiraan anggaran belanja Bappelitbang Kabupaten Tapin 2024-2026.....	23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang.....	2
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Bappelitbang .....	2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.....	2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagian Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan .....	11
Grafik 2.1	Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan .....	12
Grafik 2.2	Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang .....	13
Grafik 2.3	Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	13



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sekarang ini merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang direspon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan”. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan



Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
  - 16) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
  - 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
  - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara





- Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta pemutakhirannya;
  - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
  - 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  - 29) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
  - 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);



- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
- 32) Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 37) Peraturan Bupati Tapin Nomor 224 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapin; dan
- 38) Peraturan Bupati Tapin Nomor        Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Tapin selama 3 tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah:



1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga sinkronisasi serta sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan
4. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
5. Menjamin terbentuknya sistem inovasi daerah (SIDa) dan penguatan SIDa dalam mendukung Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tapin
6. Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian kelitbang yang dilaksanakan secara tahunan
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 3 (tiga) tahun.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1   Latar Belakang
  - 1.2   Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3   Maksud dan Tujuan
  - 1.4   Sistematika Penulisan
- BAB II       GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG
  - 2.1   Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbang
  - 2.2   Sumber Daya Bappelitbang
  - 2.3   Kinerja Pelayanan Bappelitbang
  - 2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang
- BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - 3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang
  - 3.2   Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1   Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbang



	4.2 <i>Cascading</i> kinerja Bappelitbang
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Urusan-urusan yang dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai unsur penunjang pada bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mampu menyiapkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis dan berorientasi pada masyarakat dan daerah, serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah/instansi dalam mengimplementasinya program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapin

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, maka tugas pokok Bappelitbang adalah membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan". Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Bappelitbang menyelenggarakan fungsi yakni:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur;



- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber daya manusia;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- h. pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

### 1. Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan berjalan secara efektif dan efisien yang mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian.
- c. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan infrastruktur
- d. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan sumber daya manusia;
- e. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- g. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah dan BUMN/ BUMD



- melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
- h. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD;
  - i. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya;
  - j. mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi;
  - k. mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
  - l. mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - m. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## **2. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan;



- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat.

**Sekretariat terdiri dari:**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja dan anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
mempunyai tugas membantu Sekretaris mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, dan aset, humas dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan  
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Bappelitbang;

### **3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian**

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengendalian. Kepala Bidang merupakan pejabat eselon III.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk





- perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - f. Penyusunan program, pengordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah
  - k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - m. Pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian.

**Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:**

(1) Sub Bidang Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan.

(2) Sub Bidang Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian pembangunan daerah.

**4. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur**

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi dan infrastruktur. Bidang ekonomi dan infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang setingkat pejabat eselon III.b dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang ekonomi dan infrastruktur;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perdagangan, perindustrian,



- Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
  - d. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di daerah urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
  - e. Penyusunan program dan pengordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
  - f. Pengordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
  - g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;



- h. Penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang ekonomi dan infrastruktur.

**Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari:**

(1) Sub Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi ekonomi.

(2) Sub Bidang Infrastruktur

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi infrastruktur

**5. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia**

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sosial dan Sumber Daya Manusia. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang setingkat pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- c. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- d. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di daerah urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. Penyusunan program dan pengordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- f. Pengordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;



- h. Penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang social dan sumber daya manusia.

**Bidang sosial dan sumber daya manusia terdiri dari:**

(1) Sub Bidang Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi sosial

(2) Sub Bidang sumber daya manusia

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi sumber daya manusia.

## 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, kepala bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- b. Penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- c. Penyusunan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- d. Penyusunan program pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
- e. Penyusunan program, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan



- pengembangan di daerah;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah; dan
  - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

**Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:**

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

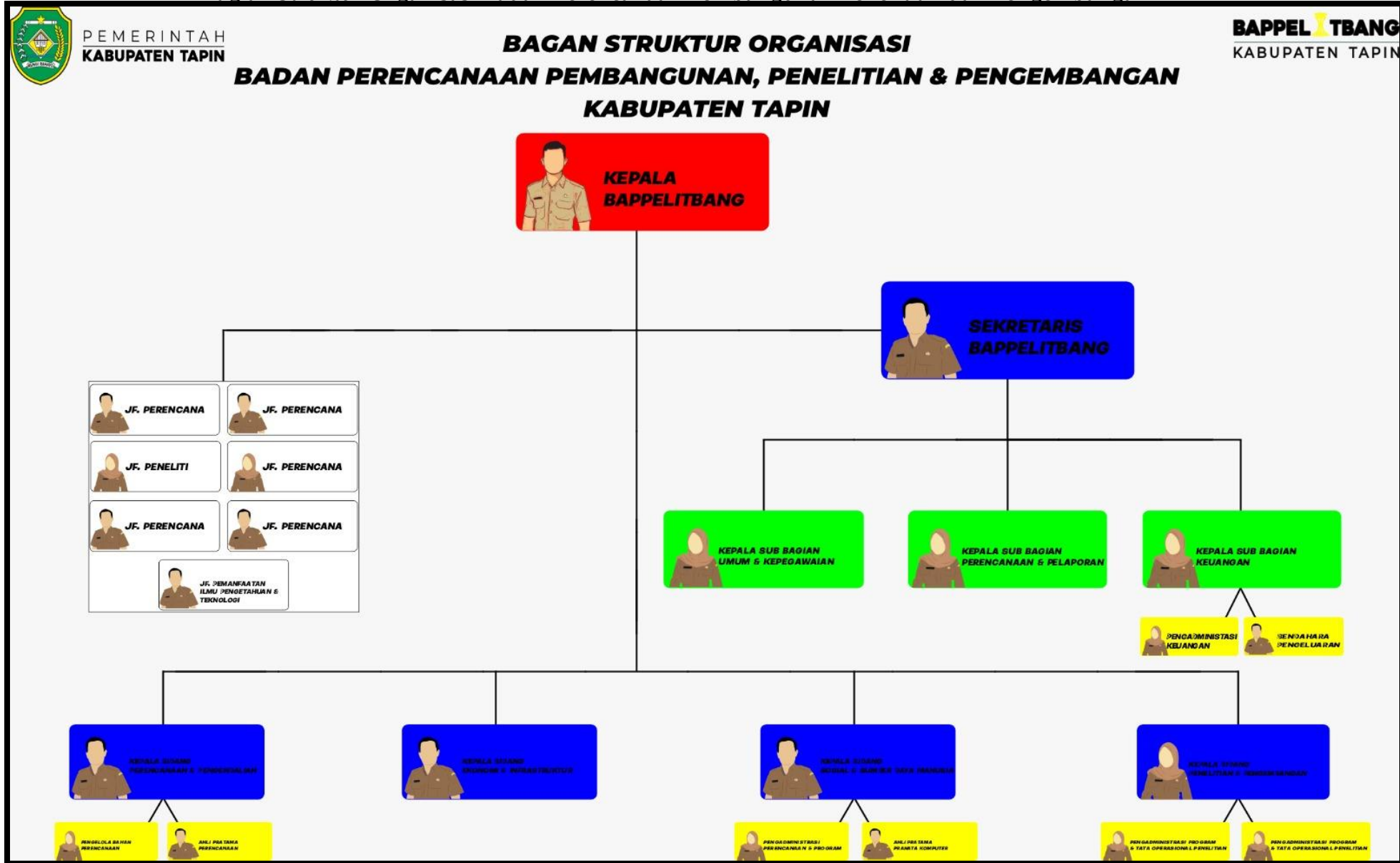
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappelitbang Kabupaten Tapin memiliki 7 (tujuh) orang yang mengisi Jabatan Fungsional yang terdiri dari 5 (lima) orang Jabatan Fungsional Perencana, 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Peneliti dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.





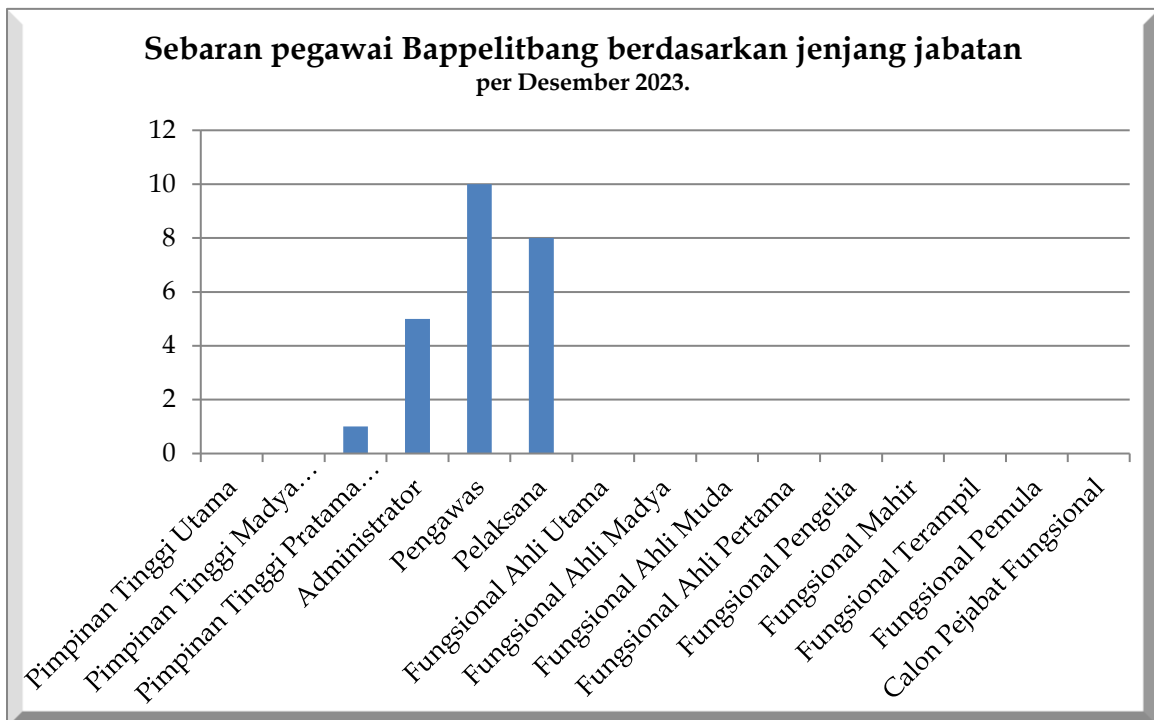
RENSTRA PERUBAHAN BAPPETITBANG 2024-2026

Gambar 2.1  
Bagian Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan



Sesuai Gambar 2.1 mengenai Struktur Organisasi diatas, berikut ini akan disajikan komposisi formasi jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Grafik 2.1  
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan



Sumber: Data kepegawaian Bappelitbang Kab Tapin

## 2.2 Sumber Daya Bappelitbang

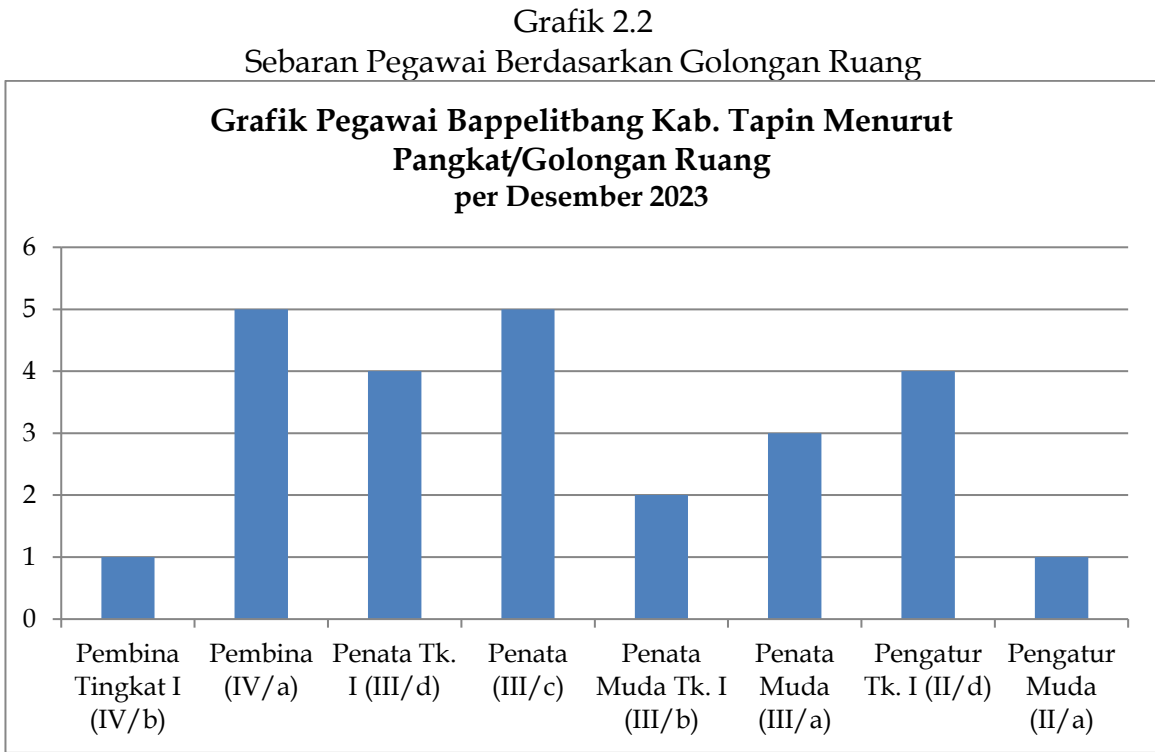
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin merupakan akumulasi dari berbagai berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, pangkat, golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan, sebagai berikut:





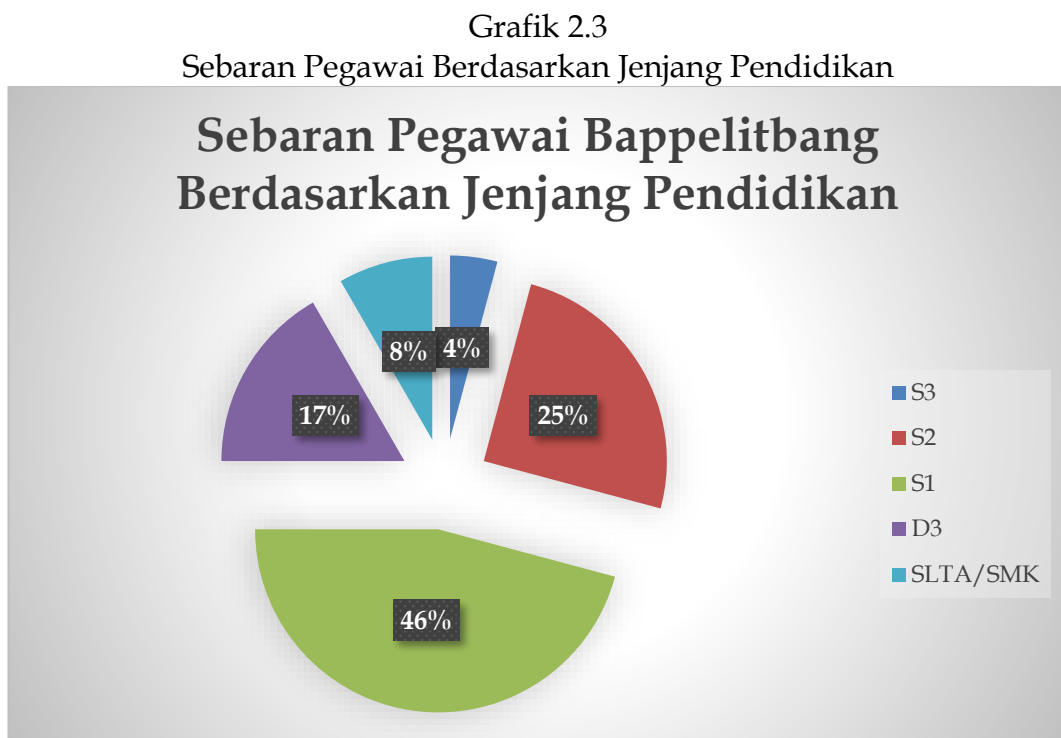
**a. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data pada grafik 2.1 diatas maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan golongan ruang yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Data kepegawaian Bappelitbang Kab Tapin

Berdasarkan data grafik 2.2, maka didapatkan sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Data kepegawaian Bappelitbang Kab Tapin



Berdasarkan gambar komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 3 (S3) sebanyak 1 (satu) orang dan Strata 2 (S2) sebanyak 5 (lima) orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 11 (sebelas) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma (D3) ada sebanyak 5 (lima) orang, sisanya sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Bappelitbang Kabupaten Tapin (43%) berpendidikan jenjang S1.

Spesifikasi pendidikan pegawai Bappelitbang Kabupaten Tapin sangat bervariasi dan sangat mendukung dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan seperti Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara, Perencanaan Kota dan Daerah, Ekonomi Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Administrasi Pembangunan, Sosial Ekonomi Pertanian, Pendidikan, Akuntansi, Manajemen Informatika, dan Kesekretariatan. Latar belakang pendidikan yang beragam tersebut semuanya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin di Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Secara kuantitas, Bappelitbang masih kekurangan aparatur sipil negara, karena hanya mempunyai 24 (dua puluh empat) ASN. Dari segi Kualitas, Bappelitbang mempunyai SDM sangat baik, hanya saja dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan terkait perencanaan pembangunan daerah menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan terkait perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian SDM Bappelitbang dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan yang lebih baik lagi.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, dengan adanya sumber daya manusia yang berpendidikan dan latar belakang yang sesuai akan mempercepat proses pembelajaran dan penerapan peraturan-peraturan terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

#### **b. Aset**

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam



mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Sarana-Prasarana

NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG			KETERANGAN
				B	KB	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sepeda Motor	8	Buah	Digunakan sendiri	8	-	-	Motor honda Supra NF DA.838.K, Motor suzuki thunder DA.5305.K, Motor suzuki axelo DA.2495.KAH, Motor Yamaha Vixion (DA.5301.KT, DA.5302.KT, DA.5303.KT, DA.5304.KT, DA.5299.KT)
Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	Mobil Toyota Innova DA.1792.KI dan Mobil Toyota Avanza DA.1167.KE
Transportable Generating Set	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
AC	29	Unit	Digunakan sendiri	27	-	2	
Tablet	3	Unit	Digunakan sendiri	2	-	1	
Monitor	2	Unit	Digunakan sendiri	1	-	1	
PC. Unit	40	Unit	Digunakan sendiri	33	-	7	
Printer	24	Unit	Digunakan sendiri	20	-	4	
Laptop	25	Unit	Digunakan sendiri	22	-	3	
Ipad	5	Unit	Digunakan sendiri	5	-	-	
Video Wall	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Televisi	9	Unit	Digunakan sendiri	8	-	1	
Kulkas	3	Unit	Digunakan sendiri	2	-	1	
Amplifier	2	Unit	Digunakan sendiri	2	-	-	
Speaker	7	Buah	Digunakan sendiri	7	-	-	
Camera	6	Unit	Digunakan sendiri	4	-	1	
Server	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
UPS	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Hardisk Eksternal	5	Buah	Digunakan sendiri	5	-	-	
Dispenser	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	



NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG			KETERANGAN
				B	KB	RB	
Scanner	7	Buah	Digunakan sendiri	6	-	1	
GPS	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Exhause Fan	5	Buah	Digunakan sendiri	5	-	-	
Stabilizer	7	Buah	Digunakan sendiri	7	-	-	
Card Reader	1	Unit	Digunakan sendiri	1	-	-	
Router	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Michrophone	3	Buah	Digunakan sendiri	3	-	-	
Audio Mixer	2	Buah	Digunakan sendiri	1	-	1	
OHP	8	Buah	Digunakan sendiri	7	-	1	
UPS	5	Buah	Digunakan sendiri	5	-	-	
Drone	1	Buah	Digunakan sendiri	-	1	-	
Recorder Display	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Vacum Cleaner	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Humidifier	2	Buah	Digunakan sendiri	2	-	-	
Video Monitor	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	
Lemari	34	Buah	Digunakan sendiri	25	9	-	
Meja	66	Buah	Digunakan sendiri	63	-	3	
Kursi	118	Buah	Digunakan sendiri	118	-	-	
Sofa	11	Buah	Digunakan sendiri	11	-	-	
Kitchen Set	1	Set	Digunakan sendiri	1	-	-	
Podium	1	Buah	Digunakan sendiri	1	-	-	

Sumber data: SIMDA BMD Bappelitbang 2024

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bappelitbang Kabupaten Tapin mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik terutama fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik,



proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Sumber daya manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi internal dan eksternal Bappelitbang Kabupaten Tapin sangat mendukung, sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan baik. Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2022-2023. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja Bappelitbang tahun 2022 dan 2023. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang dan tabel Anggaran serta Realisasi Pendanaan selama tahun 2022-2023:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang  
Pemerintah Kabupaten Tapin

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappelitbang	Target Renstra Bappelitbang Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Score 8,1	Score 7,2	Score 6.56	Score 7,2	80%	100%
2	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	90%	-	124,27%	-	138,08%	-
3	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	90%	-	93,59%	-	103,99%	-
4	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	90%	-	100%	-	111,11%	-
5	Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	90%	-	100%	-	111,11%	-
Kinerja Utama Perubahan tahun 2023							
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah	-	65	-	52,94	-	81,45%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	79	-	76,60	-	90,96%
4	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	-	70	-	47,80	-	68,29%

Sumber: LKjIP Bappelitbang 2022-2023



Tabel 2.3  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang Pemerintah Kab. Tapin

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
• Belanja pegawai	4.911.592.783	4.256.290.272	4.026.685.376	4.107.760.471	81,98%	96,51%
• Belanja barang dan jasa	6.788.832.516	9.543.414.481	5.321.583.882	7.591.551.842	78,39%	79,55%
• Belanja modal	994.386.900	1.893.101.070	414.180.000	1.454.882.134	41,65%	76,85%

Sumber data: SIMDA Keuangan 2022 dan FMIS 2023

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin selama tahun 2022-2023 dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin secara umum sudah cukup memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena hampir semua realisasi anggaran lebih dari 80% dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bappelitbang
2. Optimalisasi sistem informasi terintegrasi
3. Pematapan monitoring dan evaluasi
4. Peningkatan pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah
5. Peningkatan biaya operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
7. Diseminasi perencanaan pembangunan kepada unit kerja di Kabupaten Tapin
8. Penelitian dan pengembangan yang mulai dimanfaatkan
9. Adanya komitmen yang kuat terhadap konsistensi perencanaan pembangunan daerah

Dari hasil tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan dalam pelayanan Bappelitbang. Adapun potensi Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan proses



perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah

4. Peningkatan biaya operasional dan sarana pendukung pekerjaan
5. Adanya peraturan - peraturan yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
6. Adanya peraturan-peraturan, yang menjadi acuan dan dasar dalam Penelitian dan Pengembangan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Kelitbang
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
8. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
9. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi pembangunan
10. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD lain
11. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan semakin meningkat

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan SDM perencana dan peneliti yang berkualitas
2. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personil
3. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi
4. Perlu ditingkatkannya kualitas kebijakan terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
5. Perlu adanya SOP untuk Bappelitbang khususnya perencanaan, Penelitian dan pengembangan
6. Hasil monitoring dan evaluasi perlu digunakan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah
7. Perlu ditingkatkannya akses penggunaan data
8. Perlu ditingkatkannya keterlibatan Kepala Daerah dalam proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
9. Tenaga perencana di SKPD lain perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan proses perencanaan pembangunan daerah
10. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan, dan kelitbang
11. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.



Potensi dan permasalahan ini menjadi konsideran dalam penyusunan perencanaan Bappelitbang Kabupaten Tapin untuk periode selanjutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Bappelitbang antara lain:

1. Tingkat kesiapan SDM dan sistem dalam menghadapi dinamika perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
2. Ketepatan penempatan personil, kesesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
3. Kelengkapan dan ketepatan data yang menjadi sumber informasi utama dalam proses perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan
4. Sarana prasarana yang dimiliki Bappelitbang serta ketersediaan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappelitbang
5. Dinamika peraturan perencanaan pembangunan daerah dan ketersediaan SOP serta SPM
6. Kerjasama dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi pembangunan daerah
7. Komitmen dan keterlibatan Kepala Daerah dalam proses perencanaan pembangunan dan kelitbangan
8. Koordinasi dengan SKPD lain
9. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang**

Bappelitbang Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, sehingga selalu serasi, sinkron dan berkolaborasi.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang dalam pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin, yakni sebagai berikut:

1. Tantangan
  - a. Mendukung kebijakan pemerintah pusat agar setiap perencanaan pembangunan menerapkan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).





- b. Dinamika perubahan regulasi kebijakan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.
- c. Mengawal dan mengakomodir setiap tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
- d. *Good governance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.
- e. Memastikan tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas baik (fokus, berorientasi hasil disertai indikator yang SMART, terukur dan selaras dengan anggaran
- f. Memastikan Bappelitbang Kabupaten Tapin memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perencana dan peneliti
- h. Menyediakan dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas yang menjadi kebijakan daerah
- i. Membuat dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan mencakup juga pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, serta infrastruktur dan sumber daya manusia sesuai dengan potensi Kabupaten Tapin dan juga mempedomani peraturan perundangan serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.

## 2. Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki Bappelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi diharapkan kedepan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan organisasi, peluang-peluang tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan Bappelitbang sebagai institusi yang menjadi sentral pengolahan produk perencanaan pembangunan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa peraturan turunannya memberi peluang bagi Bappelitbang untuk menjalankan peran penting dalam proses pembangunan daerah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan arah bagi Bappelitbang dalam merespon pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan litbang.



- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan peran yang besar bagi Bappelitbang sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah dalam melaksanakan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan.
- e. Adanya kebijakan pemerintah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD\_RI) di seluruh Indonesia, yang sangat berperan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
- f. Kepercayaan pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati dan DPRD serta para stakeholders, kepada Bappelitbang sebagai lembaga perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016.
- g. Kabupaten Tapin memiliki sumber daya yang cukup untuk dikembangkan melalui perencanaan yang baik, tepat, dan berwawasan lingkungan
- h. Kabupaten Tapin kaya dengan potensi sumber daya alamnya, baik untuk pertanian, industri maupun pariwisata yang harus diteliti dan dikaji untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah.
- i. Kabupaten Tapin memiliki jumlah penduduk dan dunia usaha yang cukup memadai, dan jika dapat diberdayakan merupakan potensi sumber daya pembangunan yang cukup besar.
- j. Kesempatan yang selalu diberikan Bappenas untuk peningkatan kualitas aparat perencana di Bappelitbang, seperti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional di daerah maupun di luar daerah dan nasional.
- k. Tersedianya pendidikan formal negeri dan swasta taraf Diploma, S1, S2 dan S3 sehingga membuka kesempatan bagi peningkatan pendidikan formal aparatur Bappelitbang melalui izin ataupun tugas belajar.
- l. Pelaksanaan studi banding dan proses pembelajaran keluar daerah juga dapat membuka wawasan pemikiran dan meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbang



Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappelitbang Kabupaten Tapin dan rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin.

Untuk menghadapi tantangan dan menyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja Bappelitbang Kabupaten Tapin 2024-2026 di bawah ini.

Tabel 2.4  
Perkiraan anggaran belanja Bappelitbang Kabupaten Tapin 2024-2026

Tahun	2024	2025	2026
Anggaran	Rp22.297.883.276	Rp11.813.206.964	Rp12.908.981.367



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran pelayanan Bappelitbang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Bappelitbang juga memiliki berbagai masalah yang sudah diidentifikasi dan memerlukan penanganan secara optimal. Permasalahan-permasalahan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurang terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta kelitbang.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Terbatasnya dokumen pendukung/kajian sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah
5. Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
6. Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan belum dimanfaatkan menjadi kebijakan daerah
7. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
8. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
9. Belum terpenuhinya formasi aparatur Bappelitbang yang sesuai dengan struktur perangkat daerah.
10. Masih kurangnya disiplin dan etos kerja.
11. Belum optimalnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah
12. Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah.
13. Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan.
14. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas inovasi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait



kewenangan Bappelitbang Kabupaten Tapin. Faktor eksternal merupakan faktor yang di luar kewenangan Bappelitbang Kabupaten Tapin. Berikut akan dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin

1) Faktor Internal

- a. Tingkat pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappelitbang
- b. Kuantitas dan kualitas SDM
- c. Pembinaan internal secara berkesinambungan
- d. Program pengadaan sarana prasarana dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana
- e. Ketersediaan SOP yang jelas untuk proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
- f. Kemampuan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran
- g. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

2) Faktor Eksternal

- a. Peraturan perundangan terkait perencanaan pembangunan daerah
- b. Kebijakan kepala daerah atau pemerintah yang lebih tinggi terkait perencanaan pembangunan daerah,
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan kelitbangan,
- d. Keterlibatan pihak eksternal dalam peningkatan kualitas SDM Bappelitbang. Misal pengadaan pelatihan perencanaan dan kelitbangan oleh perguruan tinggi atau Direktorat Jenderal.
- e. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan,
- f. Keterlibatan pihak eksternal dalam proses pelayanan Bappelitbang. Misal BPS sebagai salah satu sumber data dan informasi untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, Perguruan Tinggi untuk mengkaji atau meneliti potensi pembangunan.

### 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur perencana dan peneliti serta memastikan bahwa setiap personil memiliki kapasitas dan wawasan yang baik untuk



menghadapi adanya dinamika perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik

- b. Mendorong terwujudnya "*the right man in the right place*" dalam penempatan personil dan memastikan kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang untuk memberikan pelayanan.
- c. Menyediakan data dan informasi yang aktual, handal dan terukur serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya kebijakan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan Bappelitbang
- e. Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) dan laporan kinerja sebagai pedoman teknis bagi Bappelitbang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta mengoptimalkan penggunaan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya
- g. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak eksternal Bappelitbang dalam memperoleh dan menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- h. Membangun komitmen terhadap konsistensi pembangunan dari seluruh pihak yang terlibat baik Pemerintah Kabupaten Tapin dan juga masyarakatnya
- i. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah lain, Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Pemerintah Kabupaten di lingkup Benua Enam, Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Pemerintah Pusat
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Bappelitbang untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sama dengan sasaran organisasi. Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas penelitian dan pengembangan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menetapkan sasaran strategis yakni, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Inovasi Daerah
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- d. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

#### 4.2 Cascading Kinerja Bappelitbang

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbang beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:





Tabel 4.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPELITBANG

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1			<b>Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>	7,2	6,56	7,75	8,10	8,20
		<i>Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah</i>	<i>Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)</i>	7,2	6,56	7,75	8,10	8,20
2			<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	59	62	65	67	70
		<i>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Inovasi Daerah</i>	<i>Indeks Government Award (IGA)</i>	59	62	65	67	70
3			<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	76,50	77,25	78,35	79,25	80,65
		<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	76,50	77,25	78,35	79,25	80,65
4			<b>Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>			70	80	90
		<i>Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Profesionalisme (IP-ASN) Perangkat Daerah</i>			70	80	90



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappelitbang 2024-2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Bappelitbang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:





Tabel 5.1  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BAPPELITBANG

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	Meningkatkan keselarasan dan relevansi sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah	1	Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		2	Memaksimalkan program prioritas yang terakomodir dalam RPD	2	Pengembangan manajemen sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
		3	Meningkatkan tingkat capaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah	3	Menjadwalkan penyampaian data perencanaan dan pengendalian program kegiatan oleh SKPD
		4	Peningkatan efektifitas sistem pengendalian keselarasan perencanaan dengan penganggaran Perangkat Daerah	4	Menyempurnakan/mengoptimalkan sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi pada Perangkat Daerah
		5	Menempatkan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki	5	Melaksanakan keikutsertaan bimbingan teknis, sosialisasi, diklat Perencanaan bagi seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Inovasi Daerah	1	Mensosialisasikan penyelenggaraan inovasi daerah kepada baik Perangkat Daerah maupun masyarakat umum	1	Menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan inovasi daerah
		2	Menempatkan Tenaga Fungsional Peneliti	2	Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain ( <i>stakeholder, Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan) untuk membantu meningkatkan inovasi daerah



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		3	Meningkatkan Penelitian yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	3	Menyelenggarakan keikutsertaan bimbingan teknis, sosialisasi, diklat bagi Peneliti
		4	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	4	Peningkatan penelitian yang dikembangkan menjadi kebijakan daerah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	5	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
				1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
				2	Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
		2	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	3	Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
				1	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
				2	Meningkatkan evaluasi capaian kinerja secara berkesinambungan
3	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		



<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1	Meningkatkan Kompetensi ASN Perangkat Daerah	1	Meningkatkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Pendidikan Kilat (DIKLAT) ASN Perangkat Daerah

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbang dengan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan sub kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Bappelitbang tahun 2024-2026. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya.

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Bappelitbang dapat dilihat pada Tabel 6.1:





Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan																	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah																	
Meningkatnya Pencapaian Pembangunan Daerah dalam Mewujudkan Visi dan Misi Daerah																	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	0	100	3.973.929.515,00	100	1.975.000.000,00	100	2.156.228.500,00	100	8.105.158.015	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian			
				Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.519.611.167	100	1.285.000.000	100	1.404.119.500	100	5.208.730.667	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan			



5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	95.443.200	3	60.000.000	3	65.562.000	8	221.005.200	JF Perencana Sub Bidang Perencanaa n	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	75.000.000	3	40.000.000	3	43.708.000	8	158.708.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaa n	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Dengan Satuan:Berita Acara)	0	1	300.000.000	2	150.000.000	2	163.905.000	5	613.905.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaa n	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	2	80.915.000	2	60.000.000	2	65.562.000	6	206.477.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaa n	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	2	590.805.000	1	250.000.000	1	273.175.000	4	1.113.980.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaa n	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Dengan Satuan:Usulan)	-	405	382.506.757	405	225.000.000	405	245.857.500	1215	853.364.257	JF Perencana Sub Bidang Perencanaa n	Kabu paten Tapin ,Sem ua Keca mata n
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3	994.941.210	2	500.000.000	3	546.350.000	8	2.041.291.210	JF Perencana Sub Bidang Perencanaa n	Kabu paten Tapin
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi indikator</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>691.015.000</b>	<b>100</b>	<b>370.000.000</b>	<b>100</b>	<b>399.664.000</b>	<b>0</b>	<b>1.460.679.000</b>	<b>Kepala Bidang</b>	



		Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Dengan Satuan:Persen)										Perencanaa n dan Pengendali an	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan:Masukan)	1	1	291.015.000	1	150.000.000	1	163.905.000	3	604.920.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabupaten Tapin	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan:Orang)	0	53	200.000.000	53	120.000.000	53	131.124.000	159	451.124.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabupaten Tapin	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan:Buku)	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	104.635.000	3	404.635.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabupaten Tapin	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>763.303.348</b>	<b>100</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100</b>	<b>352.445.000</b>	<b>100</b>	<b>1.435.748.348</b>	<b>JF Perencana Sub Bidang Pengendalian</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	485.172.318	1	170.000.000	1	188.540.000	3	843.712.318	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	Kabupaten Tapin	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Dengan Satuan:Kerja Sama)	0	1	100.000.000	1	50.000.000	1	54.635.000	3	204.635.000	JF Perencana Sub Bidang Pengendalian	Kabupaten Tapin	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	178.131.030	4	100.000.000	4	109.270.000	12	387.401.030	JF Perencana Sub Bidang	Kabupaten Tapin	





RENSTRA PERUBAHAN BAPELITBANG 2024-2026

												Pengendalian	
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.620.093.988,00	100	1.178.143.000,00	100	1.287.362.000,00	100	5.085.598.988	Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kabupaten Tapanuli Selatan
		Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kabupaten Tapanuli Selatan
		Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra ekonomi dan Infrastrukturyang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Tapanuli Selatan
		Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Tapanuli Selatan
5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	930.539.700	100	413.143.000	100	451.447.000	100	1.795.129.700	JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan



			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	90	90		90		90		90		JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabupaten Tapi n
			Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabupaten Tapi n
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	151.193.000	2	63.143.000	3	68.997.000	7	283.333.000		JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kabupaten Tapi n
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	9	9	101.807.000	9	35.000.000	9	38.245.000	27	175.052.000		JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kabupaten Tapi n
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	70.840.200	4	40.000.000	4	43.708.000	12	154.548.200		JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kabupaten Tapi n
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	65.000.000	1	71.028.000	3	286.028.000		JF Perencanaan Sub Bidang Sosial	Kabupaten Tapi n
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	3	2	153.600.000	2	65.000.000	3	71.028.000	7	289.628.000		JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabupaten Tapi n



		Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	(RPJPD, RPJMD dan RKPJ) (Dengan Satuan:Dokumen)											
	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	9	9	108.032.100	9	40.000.000	9	43.708.000	27	191.740.100	JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	9	9	70.067.400	9	40.000.000	9	43.708.000	27	153.775.400	JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	125.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	261.025.000	JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>759.407.200</b>	<b>90</b>	<b>405.000.000</b>	<b>90</b>	<b>442.543.000</b>	<b>90</b>	<b>1.606.950.200</b>	<b>JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>
			<b>Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD).	3	2	132.000.000	2	75.000.000	3	81.952.500	7	288.952.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin



		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)											
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	10	10	79.825.200	10	35.000.000	10	38.244.500	30	153.069.700	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	10	10	57.582.000	10	35.000.000	10	38.244.500	30	130.826.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	120.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	256.025.000	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	80.000.000	2	50.000.000	3	54.635.000	7	184.635.000	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	10	80.000.000	10	35.000.000	10	38.244.500	30	153.244.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	10	60.000.000	10	35.000.000	10	38.244.500	30	133.244.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin	



5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	75.000.000	1	81.952.500	3	306.952.500	JF Perencanaan Sub Bidang Perekonomian	Kabupaten Tapin
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>930.147.088</b>	<b>100</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100</b>	<b>393.372.000</b>	<b>100</b>	<b>1.683.519.088</b>	<b>JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>
		<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2	141.545.960	2	65.000.000	3	71.025.500	7	277.571.460	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	17	17	95.811.000	17	35.000.000	17	38.244.500	51	169.055.500	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	17	17	70.848.000	17	35.000.000	17	38.244.500	51	144.092.500	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	149.908.080	1	65.000.000	1	71.025.500	3	285.933.580	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin



		Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur												
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	145.000.000	2	40.000.000	3	43.708.000	7	228.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	17	97.034.048	17	40.000.000	17	43.708.000	51	180.742.048	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	17	80.000.000	17	40.000.000	17	43.708.000	51	163.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	40.000.000	1	43.708.000	3	233.708.000	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapin
<b>Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan</b>														
<b>Meningkatnya hasil kelitbangan</b>														
	5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase inovasi daerah yang direplikasi (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.471.877.200,00</b>	<b>100</b>	<b>645.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>704.640.000,00</b>	<b>100</b>	<b>4.821.517.200</b>	<b>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>
			<b>Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>Kepala Bidang Penelitian dan</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>



													Pengembangan	
5.05.02.2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100	150.000.000	100	25.000.000	100	27.317.500	100	202.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	150.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	202.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi. (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100	1.035.000.000	100	225.000.000	100	245.857.500	100	1.505.857.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin	



5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi.. (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.239.577.200</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>273.175.000</b>	<b>100</b>	<b>1.762.752.200</b>	<b>JF Peneliti</b>	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	204.577.200	1	25.000.000	1	27.317.500	3	256.894.700	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin





5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Inovasi Daerah yang dihimpun dalam database inovasi daerah (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.047.300.000</b>	<b>100</b>	<b>145.000.000</b>	<b>100</b>	<b>158.290.000</b>	<b>100</b>	<b>1.350.590.000</b>	<b>JF PEMAANFAATAN IPTEK</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	277.200.000	1	25.000.000	1	27.390.000	3	329.590.000	JF PEMAANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi	1	1	356.000.000	1	20.000.000	1	21.900.000	3	397.900.000	JF PEMAANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin



			dan Penerapan Teknologi (Dengan Satuan:Laporan)											
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	214.100.000	1	75.000.000	1	82.000.000	3	371.100.000	JF PEMAANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin
	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	200.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	3	252.000.000	JF PEMAANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>														
<b>Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</b>														
	5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.231.982.573,00</b>	<b>100</b>	<b>8.015.063.964,00</b>	<b>100</b>	<b>8.760.750.867,00</b>	<b>100</b>	<b>29.007.797.404</b>	<b>SEKRETARIS</b>	<b>Bappelitbang</b>
			<b>Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>SEKRETARIS</b>	
			<b>Persentase ASN dengan capaian kinerja &gt;90% (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>SEKRETARIS</b>	
	5.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase usulan program, kegiatan, sub-kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>161.916.000</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100</b>	<b>88.105.000</b>	<b>100</b>	<b>330.021.000</b>	<b>Kasubag Perencanaan dan Pelaporan</b>	<b>Bappelitbang</b>
			<b>Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>Kasubag Perencanaan dan Pelaporan</b>	
			<b>Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>Kasubag Perencanaan dan Pelaporan</b>	



5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	5	39.750.00 0	5	30.000.0 00	8	33.470.0 00	18	103.220.0 0	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	5	42.400.00 0	5	10.000.0 00	8	10.927.0 00	18	63.327.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	9	11	37.366.00 0	11	30.000.0 00	11	32.781.0 00	33	100.147.0 0	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	11	42.400.00 0	11	10.000.0 00	11	10.927.0 00	33	63.327.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	5.296.774 .201	100	5.265.06 3.964	100	5.781.93 1.867	100	16.343.770 .032	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
		Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Keuangan	
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Keuangan	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	23	25	5.235.274 .201	25	5.235.06 3.964	25	5.749.43 1.867	25	16.219.770 .032	Kasubag Keuangan	Bappelitbang



5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	16.300.000	3	61.300.000	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	31.500.000	1	15.000.000	1	16.200.000	3	62.700.000	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Dengan Satuan:Score)	4,3	4,3	4.281.992.372	4,4	1.265.000.000	4,5	1.350.499.500	4,5	6.897.491.872	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	99.800.000	12	35.000.000	12	38.000.000	36	172.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	1.455.000.000	12	425.000.000	12	464.000.000	36	2.344.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	239.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	36	449.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin



5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	47.000.000	12	20.000.000	12	21.854.000	36	88.854.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	342.000.000	12	150.000.000	12	133.905.000	36	625.905.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	23.793.000	12	15.000.000	12	16.390.500	36	55.183.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	2.055.399.372	12	500.000.000	12	546.350.000	36	3.101.749.372	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>796.000.000</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100</b>	<b>418.540.000</b>	<b>100</b>	<b>1.614.540.000</b>	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	10	596.000.000	10	200.000.000	10	218.540.000	30	1.014.540.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin



5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	25	200.000.000	20	200.000.000	15	200.000.000	50	600.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat. (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.142.300.000</b>	<b>100</b>	<b>675.000.000</b>	<b>100</b>	<b>737.572.500</b>	<b>100</b>	<b>2.554.872.500</b>	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	688.000.000	12	450.000.000	12	491.715.000	36	1.629.715.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	270.300.000	12	125.000.000	12	136.587.500	36	531.887.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	184.000.000	12	100.000.000	12	109.270.000	36	393.270.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>553.000.000</b>	<b>100</b>	<b>330.000.000</b>	<b>100</b>	<b>384.102.000</b>	<b>100</b>	<b>1.267.102.000</b>	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	10	10	377.000.000	10	195.000.000	10	245.857.500	30	817.857.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	20	76.000.000	20	35.000.000	20	38.244.500	60	149.244.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin



5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
-----------------	--	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	------------------------------	-----------------

# PERUBAHAN RENSTRA 2024-2026

## Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

### Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.973.929.515	100	1.975.000.000	100	2.156.228.500	100	8.105.158.015	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100%	100		100		100		100		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian



		Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persen)	92%	91,72%		93,00%		95%		95%		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80%	80%		85%		90%		90%		Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.519.611 .167	100	1.285.00 0.000	100	1.404.11 9.500	100	5.208.730. 667	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
		Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
		Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		JF Perencana Sub Bidang	





												Perencanaan	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1	1	95.443.200	3	60.000.000	2	65.562.000	7	221.005.200	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2	75.000.000	3	40.000.000	2	43.708.000	7	158.708.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0	1	300.000.000	2	150.000.000	1	163.905.000	4	613.905.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	80.915.000	1	60.000.000	1	65.562.000	3	206.477.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota	1	1	590.805.000	2	250.000.000	1	273.175.000	4	1.113.980.000	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabu paten Tapin
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	405	382.506.757	405	225.000.000	405	245.857.500	1215	853.364.257	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabu paten Tapin ,Sem ua Keca mata n
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1	3	994.941.210	2	500.000.000	3	546.350.000	8	2.041.291.210	JF Perencana Sub Bidang Perencanaan	Kabu paten Tapin



5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)</b>	80	80	691.015.000	90	370.000.000	100	399.664.000	100	1.460.679.000	<b>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian</b>	<b>Kabupaten Tapan</b>
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	291.015.000	1	150.000.000	1	163.905.000	3	604.920.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabupaten Tapan
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0	53	200.000.000	53	120.000.000	53	131.124.000	159	451.124.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabupaten Tapan
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	104.635.000	3	404.635.000	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Kabupaten Tapan
5.01.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100	763.303.348	100	320.000.000	100	352.445.000	100	1.435.748.348	<b>JF Perencana Sub Bidang Pengendalian</b>	<b>Kabupaten Tapan</b>
		<b>Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100		100		100		100			<b>Kabupaten Tapan</b>
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	485.172.318	1	170.000.000	1	188.540.000	3	843.712.318		Kabupaten Tapan



RENSTRA PERUBAHAN BAPELITBANG 2024-2026

	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	0	1	100.000.000	1	50.000.000	1	54.635.000	3	204.635.000		Kabupaten Tapin
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	4	178.131.030	4	100.000.000	4	109.270.000	12	387.401.030		Kabupaten Tapin
	<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.620.093.988</b>	<b>100</b>	<b>1.178.143.000</b>	<b>100</b>	<b>1.287.362.000</b>	<b>100</b>	<b>5.085.598.988</b>	<b>Kepala Bidang Sosial dan SDM</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Tapin
			Persentase Keselarasan Renja OPD bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)		100		100		100		1100		Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kabupaten Tapin
			Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)		100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Tapin
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Tapin



			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Tapi n
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM (Dengan Satuan:Persen)	80	80		85		90		90		Kepala Bidang Sosial dan SDM	Kabupaten Tapi n
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)		80		85		90		90		Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Tapi n
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	930.539.700	100	413.143.000	100	451.447.000	100	1.795.129.700	JF Perencan Sub Bidang Sosial	Kabupaten Tapi n
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang sosial sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			Kabupaten Tapi n
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			Kabupaten Tapi n
			Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi n



			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100				Kabupaten Tapi
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100				Kabupaten Tapi
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100				Kabupaten Tapi
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100				Kabupaten Tapi
			Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100			JF Perencanaan Sub Bidang SDM	Kabupaten Tapi
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100				Kabupaten Tapi



		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	3	3	151.193.000	2	63.143.000	3	68.997.000	8	283.333.000		Kabupaten Tapi



	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	3	101.807.000	2	35.000.000	3	38.245.000	8	175.052.000		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	70.840.200	4	40.000.000	4	43.708.000	12	154.548.200		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0	1	150.000.000	1	65.000.000	3	71.028.000	5	286.028.000		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	153.600.000	2	65.000.000	3	71.028.000	8	289.628.000		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	3	108.032.100	2	40.000.000	4	43.708.000	9	191.740.100		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	70.067.400	4	40.000.000	9	43.708.000	17	153.775.400		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0	1	125.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	261.025.000		Kabupaten Tapin



		Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	759.407.2 00	100	405.000. 000	100	442.543. 000	100	1.606.950. 200	JF Perencana n Sub Bidang Perekonom ian	Kabu pate n Tapi n
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100			
			Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Ekonomi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			





		<b>Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100		100		100		100			
		<b>Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100		100		100		100			
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	3	132.000.000	2	75.000.000	3	81.952.500	7	288.952.500		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	3	79.825.200	10	35.000.000	3	38.244.500	30	153.069.700		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	57.582.000	10	35.000.000	4	38.244.500	30	130.826.500		Kabupaten Tapin
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0	1	120.000.000	1	65.000.000	1	71.025.000	3	256.025.000		Kabupaten Tapin



5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	3	80.000.00 0	2	50.000.0 00	3	54.635.0 00	7	184.635.00 0		Kabu paten Tapin
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	3	80.000.00 0	2	35.000.0 00	3	38.244.5 00	30	153.244.50 0		Kabu paten Tapin
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	4	60.000.00 0	4	35.000.0 00	4	38.244.5 00	30	133.244.50 0		Kabu paten Tapin
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0	1	150.000.0 00	1	75.000.0 00	1	81.952.5 00	3	306.952.50 0		Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>930.147.0 88</b>	<b>100</b>	<b>360.000. 000</b>	<b>100</b>	<b>393.372. 000</b>	<b>100</b>	<b>1.683.519. 088</b>	<b>JF Perencana n Sub Bidang Infrastrukt ur</b>	<b>Kabu pate n Tapi n</b>
		<b>Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan:Persen)</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>Kabu pate n Tapi n</b>
		<b>Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>Kabu pate n Tapi n</b>



		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100			Kabupaten Tapi
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	141.545.960	2	65.000.000	3	71.025.500	8	277.571.460	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tapi



5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	3	95.811.00 0	2	35.000.0 00	3	38.244.5 00	8	169.055.50 0	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	70.848.00 0	4	35.000.0 00	4	38.244.5 00	12	144.092.50 0	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0	1	149.908.0 80	1	65.000.0 00	1	71.025.5 00	3	285.933.58 0	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	3	145.000.0 00	2	40.000.0 00	3	43.708.0 00	8	228.708.00 0	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	3	97.034.04 8	2	40.000.0 00	3	43.708.0 00	8	180.742.04 8	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	4	80.000.00 0	4	40.000.0 00	4	43.708.0 00	12	163.708.00 0	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0	1	150.000.0 00	1	40.000.0 00	1	43.708.0 00	3	233.708.00 0	JF Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Kabu paten Tapin



Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah													
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.471.877.200	100	645.000.000	100	704.640.000	100	4.821.517.200	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Tapi n
		Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Tapi n
		Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan (Dengan Satuan:Persen)	73,62	73,62		76,69		79,75		79,75			Kabupaten Tapi n
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	150.000.000	100	25.000.000	100	27.317.500	100	202.317.500	JF Peneliti	Kabupaten Tapi n
		Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
		Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		JF Peneliti	



5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0	1	150.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	202.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100	1.035.000.000	100	225.000.000	100	245.857.500	100	1.505.857.500	JF Peneliti	
		<b>Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
		<b>Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
		<b>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan:Persen)</b>	100	100		100		100		100		JF Peneliti	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosia	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin



5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.239.577.200	100	250.000.000	100	273.175.000	100	1.762.752.200	JF Peneliti	Kabupaten Tapin
		Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		JF Peneliti		Kabupaten Tapin	
		Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		JF Peneliti		Kabupaten Tapin	
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		JF Peneliti		Kabupaten Tapin	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin



5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	204.577.200	1	25.000.000	1	27.317.500	3	256.894.700		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	1	115.000.000	1	25.000.000	1	27.317.500	3	167.317.500		Kabupaten Tapin
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	30,67	30,67	1.047.300.000		145.000.000	100	158.290.000	100	1.350.590.000	JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin
		Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	80	80		90		100		100		JF PEMANFAATAN IPTEK	Kabupaten Tapin





		<b>Persentase inovasi daerah yang direplikasi</b>	<b>0</b>	<b>23,70</b>		<b>25,93</b>		<b>25,93</b>		<b>25,93</b>		<b>JF PEMANFAATAN IPTEK</b>	Kabu paten Tapin
		<b>Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>JF PEMANFAATAN IPTEK</b>	Kabu paten Tapin
		<b>Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>73,62</b>	<b>73,62</b>		<b>76,69</b>		<b>79,75</b>		<b>79,75</b>		<b>JF PEMANFAATAN IPTEK</b>	Kabu paten Tapin
		<b>Persentase Inovasi Daerah yang dibina</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>JF PEMANFAATAN IPTEK</b>	Kabu paten Tapin
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	1	277.200.000	1	25.000.000	1	27.390.000	3	329.590.000		Kabu paten Tapin
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	356.000.000	1	20.000.000	1	21.900.000	3	397.900.000		Kabu paten Tapin
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	214.100.000	1	75.000.000	1	82.000.000	3	371.100.000		Kabu paten Tapin
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	0	1	200.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	3	252.000.000		Kabu paten Tapin



**Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)  
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**

5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Komponen AKIP:</b> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan:Nilai)	25,00 25,00 11,55 16,80	25,00 25,00 11,55 16,80	12.231.98 2.573	26,00 26,00 12,00 18,00	8.015.06 3.964	27,00 27,00 12,50 20,00	8.760.75 0.867	27,00 27,00 12,50 20,00	29.007.797 .404	<b>SEKRETARIS</b>	<b>Bappelitbang</b>
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		<b>SEKRETARIS</b>	<b>Bappelitbang</b>
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)	100	90		100		100		100		<b>SEKRETARIS</b>	<b>Bappelitbang</b>
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:Sscore)	4	4		4		4		4		<b>SEKRETARIS</b>	<b>Bappelitbang</b>
5.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan:Persen)  Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:Persen)  Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100 100 100	100 100 100	161.916.0 00	100 100 100	80.000.0 00	100 100 100	88.105.0 00	100 100 100	330.021.0 0	<b>Kasubag Perencanaan dan Pelaporan</b>	<b>Bappelitbang</b>
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	6	39.750.00 0	5	30.000.0 00	8	33.470.0 00	19	103.220.0 0	<b>Kasubag Perencanaan dan Pelaporan</b>	<b>Bappelitbang</b>
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0	5	42.400.00 0	5	10.000.0 00	8	10.927.0 00	18	63.327.000	<b>Kasubag Perencanaan</b>	<b>Bappelitbang</b>



		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										n dan Pelaporan	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	11	37.366.000	11	30.000.000	11	32.781.000	33	100.147.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	11	42.400.000	11	10.000.000	11	10.927.000	33	63.327.000	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Bappelitbang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	5.296.774.201	100	5.265.063.964	100	5.781.931.867	100	16.343.770.032	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	25	5.235.274.201	25	5.235.063.964	25	5.749.431.867	25	16.219.770.032	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	16.300.000	3	61.300.000	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	31.500.000	1	15.000.000	1	16.200.000	3	62.700.000	Kasubag Keuangan	Bappelitbang
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan	100	100	4.281.992.372	100	1.265.000.000	100	1.350.499.500	100	6.897.491.872	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang



		<b>kapasitas (Dengan Satuan:Persen)</b>											
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	99.800.000	1	35.000.000	1	38.000.000	3	172.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1.455.000.000	1	425.000.000	1	464.000.000	3	2.344.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	239.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	3	449.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	47.000.000	1	20.000.000	1	21.854.000	3	88.854.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	342.000.000	1	150.000.000	1	133.905.000	3	625.905.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1	23.793.000	1	15.000.000	1	16.390.500	3	55.183.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	2.055.399.372	1	500.000.000	1	546.350.000	3	3.101.749.372	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang



5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>796.000.000</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100</b>	<b>418.540.000</b>	<b>100</b>	<b>1.614.540.000</b>	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Bappelitbang</b>
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	10	596.000.000	10	200.000.000	10	218.540.000	30	1.014.540.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik. (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.142.300.000</b>	<b>100</b>	<b>675.000.000</b>	<b>100</b>	<b>737.572.500</b>	<b>100</b>	<b>2.554.872.500</b>	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Bappelitbang</b>
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	1	688.000.000	1	450.000.000	1	491.715.000	3	1.629.715.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	270.300.000	1	125.000.000	1	136.587.500	3	531.887.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	184.000.000	1	100.000.000	1	109.270.000	3	393.270.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang
5.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>553.000.000</b>	<b>100</b>	<b>330.000.000</b>	<b>100</b>	<b>384.102.000</b>	<b>100</b>	<b>1.267.102.000</b>	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Bappelitbang</b>
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	377.000.000	10	195.000.000	10	245.857.500	30	817.857.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang



	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	20	76.000.000	20	35.000.000	20	38.244.500	60	149.244.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Bappelitbang	
<b>TOTAL:</b>					<b>22.297.883.276</b>		<b>11.813.206.964</b>		<b>12.908.981.367</b>		<b>47.020.071.607</b>			



Tabel 6.2  
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Bappelitbang Kabupaten Tapin 2024-2026

RENSTRA PERUBAHAN BAPPELITBANG 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		K	Rp		K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-16		
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah																
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.973.929.515	100	1.975.000.000	100	2.156.228.500	100	8.105.158.015	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian		
				Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator) (Dengan Satuan:Persen)	100	80		90		100		100				
				Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data	80	80		90		100		100				



			(Dengan Satuan:Persen)										
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100%	100		100		100		100		
			Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persen)	91,72%	91,72%		93,00%		95%		95%		
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80%	80%		90%		100%		100%		
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.620.093.988	100	1.178.143.000	100	1.287.362.000	100	5.085.598.988	Kepala Bidang Sosia dan SDM, Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang		100		100		100		100		





			disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)									
			Persentase Keselarasan Renja OPD bidang sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100	100		100		100		1100	
			Persentase Keselarasan Renja OPD bidang ekonomi dan infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100	100		100		100		1100	
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100	
			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)		100		100		100		100	



			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM (Dengan Satuan:Persen)	80	80		90		100		100		
			Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan:Persen)		80		90		100		100		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Inovasi Daerah													
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.471.877.200	100	645.000.000	100	704.640.000	100	4.821.517.200	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
			Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		
			Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan (Dengan Satuan:Persen)	73,62	73,62		76,69		79,75		79,75		



RENSTRA PERUBAHAN BAPELITBANG 2024-2026

Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah												
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen	25,00	25,00	12.231.98	25,00	8.015.063.	25,00	8.760.750.	25,00	29.007.797.404	Sekretaris
		AKIP:	25,00	25,00	2.573	25,00	964	25,00	867	25,00		
		- Perencanaan	11,55	11,55		11,55		11,55		11,55		
		Kinerja	16,80	16,80		16,80		16,80		16,80		
		- Pengukuran										
		Kinerja										
- Pelaporan Kinerja												
- Evaluasi Kinerja												
(Dengan Satuan:Nilai)												
Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)		100	100		100		100		100			
Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:Persen)		100	90		100		100		100			
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:Sscore)		4	4		4		4		4			
<b>TOTAL:</b>				<b>22.297.883.276</b>		<b>11.813.206.964</b>		<b>12.908.981.367</b>		<b>47.020.071.607</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Bappelitbang

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pada pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Dalam periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Indikator kinerja Bappelitbang dengan target sampai dengan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1:





Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA		
		PADA TAHUN KE-				
		2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,3	85,95	78,35	82,00	86,50
2	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	47,80	70	72	75
3	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	6,56	7,20	77,75	78,50	80,00
4	Indeks Inovasi Daerah	59	62	65	67	70



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Bappelitbang**  
**Bidang Urusan Perencanaan dan Penelitian**

TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>URUSAN PERENCANAAN</b>										
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>										
<b>Meningkatnya Pencapaian Pembangunan Daerah dalam Mewujudkan Visi dan Misi Daerah</b>										
	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluais Pembangunan Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	3.973.929.515	100%	1.975.000.000	100%	2.156.228.500	100%	8.105.158.015
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja)	100%		90%		100%		100%	
		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data	80%		90%		100%		100%	
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu	100%		100%		100%		100%	
		Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	91,72 %		93,00 %		95,00 %		95%	
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	80%		90%		100%		100%	
		<b>Persentase jadwal Proses Perencanaan Pembangunan</b>	100%	2.519.611.167	100%	1.285.000.000	100%	1.404.119.500	100%	5.208.730.667



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian	Daerah sesuai dengan ketentuan								
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	80%	691.015.000	90%	370.000.000	100%	399.664.000	100%	1.460.679.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	100%	763.303.348	100%	320.000.000	100%	352.445.000	100%	1.435.748.348
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama	100%		100%		100%		100%	



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti								
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	2.620.093.988	100%	1.178.143.000	100%	1.287.362.000	100%	5.085.598.988
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu	100%		100%		100%		100%	
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM	80%		90%		100%		100%	
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100%		100%		100%		100%	





TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur Perangkat Daerah Tepat waktu	100%		100%		100%		100%	
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur	80%		90%		100%		100%	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100%	930.539.700	100%	413.143.000	100%	451.447.000	100%	1.795.129.700
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan	100%		100%		100%		100%	



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan								
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja	100%		100%		100%		100%	



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan								
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	759.407.200	100%	405.000.000	100%	442.543.000	90%	1.606.950.200
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi Sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang ekonomi ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	930.147.088	100%	360.000.000	100%	393.372.000	100%	1.683.519.088
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang	100%		100%		100%		100%	



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Infrastruktur yang ditindaklanjuti								
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		100%	
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang infrastruktur ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%	
<b>URUSAN PENELITIAN</b>										
Meningkatnya penelitian dan pengembangan dalam pembangunan										
Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah										
Meningkatnya hasil kelitbangan										
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan	100%	3.471.877.200	100%	645.000	100%	704.640.000	100%	4.821.517.200
		Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan	100%		100%		100%		100%	



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	73,62							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%	150.000.000	100%	25.000.000	100%	27.317.500	100%	202.317.500
		Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	100%		100%		100%		100%	
		Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	100%		100%		100%		100%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%	1.035.000.000	100%	225.000.000	100%	245.857.500	100%	1.505.857.500
		Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	100%		100%		100%		100%	
		Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	100%		100%		100%		100%	



TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN						KONDISI AKHIR	
			2024		2025		2026		K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	100%	1.239.577.200	100%	250.000.000	100%	273.175.000	100%	1.762.752.200
		Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis	100%		100%		100%		100%	
		Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	100%		100%		100%		100%	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	30,67	1.047.300.000		145.000.000		158.290.000		1.350.590.000
		Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	80%		90%		100%		100%	
		Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100%		100%		100%		100%	
		Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti								
		Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100%		100%		100%		100%	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan perencanaan pembangunan serta kelitbangan sesuai permasalahan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta dalam lingkup pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan. Keberhasilan implementasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa





dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

 **BUPATI TAPIN,**  
  
**MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd.**

